

Kekerasan Politik, Terorisme dan Kondisi Yang Memungkinkannya^{*)}

A. Hasnan Habib

Rasa takut merupakan salah satu kelemahan manusia. Terorisme ialah pengeksploitasian rasa takut itu secara sistematis dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Tetapi kekerasan yang dimaksud bukan sembarang kekerasan. Bukan kekerasan kriminal biasa. Melainkan kekerasan yang bermotivasi politik untuk mencapai

tujuan-tujuan politik. Dengan demikian terorisme merupakan salah satu bentuk dari kekerasan politik (*"political violence"*), atau juga disebut kekerasan sipil (*"civil violence"*), untuk membedakannya dari kekerasan militer. Kekerasan politik adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan untuk mempengaruhi atau mengubah proses atau sistem politik (domestik).

^{*)} Redaksi merasa perlu untuk menampilkan kembali tulisan ini karena masih relevan dengan kondisi saat sekarang.

Kekerasan politik meliputi spektrum yang luas, mulai dari kekerasan individual atau kelompok sebagai aksi "unjuk rasa" atau protes, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, insurjensi, sampai ke revolusi.

Perang antar negara yang "murni" tidak termasuk di dalamnya. Tetapi perang saudara atau perang dalam negeri termasuk, walaupun kadang-kadang ikut terlibat kekuatan-kekuatan luar dan berlangsung tidak hanya dalam batas-batas wilayah nasional. Dalam pengertian kekerasan politik juga termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyat atau sebahagian dari rakyatnya sendiri.¹⁾

Sejak akhir Perang Dunia II kekerasan sipil merupakan gejala yang menarik banyak perhatian. Dibanding perang antar-negara, kekerasan sipil jauh lebih banyak. Surat kabar *New York Times* menulis, bahwa selama periode 1946 - 1959 saja telah terjadi 1,200 kekerasan sipil, meliputi perang saudara, gerilya, huru-hara, kekacauan-kekacauan luas, terorisme, pemberontakan dan kudeta.²⁾ Terutama dalam dasawarsa 1960, peristiwa-

wa-peristiwa kekerasan itu sangat menonjol. Ia berlangsung tidak saja dalam negara-negara Dunia Ketiga, tetapi juga di negara-negara maju, tanpa memandang tingkat kebudayaan, peradaban, atau tingkat kemajuan dari masyarakat dalam negara-negara itu. Antara 1961 dan 1968, kekerasan-kekerasan politik telah terjadi di 114 dari 121 negara di dunia, atau 94,2 proses, seperti pembunuhan, kudeta, huru-hara, perang saudara, dan sebagainya.³⁾ Dalam tahun 1988 tercatat 856 tindakan terorisme internasional saja, tetapi kemudian berkurang menjadi 455 pada tahun 1990, karena meningkatnya kerjasama antarnegara membasikan terorisme internasional.⁴⁾

Makalah ini mencoba meninjau fenomena kekerasan politik dan terorisme, serta faktor-faktor dan kondisi yang memungkinkan timbulnya fenomena itu. Terlebih dahulu akan ditelaah fenomena kekerasan politik secara umum, termasuk faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan politik itu. Sebenarnya adalah tidak mungkin menentukan faktor-faktor penyebab kekerasan politik yang berlaku universal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan pengambilan ke-

simpulan, misalnya, bahwa jika kondisi "X" yang dalam negara "V" telah mencetuskan pemberontakan, juga terdapat dalam negara "Z", yang budaya - peradaban - kemajuannya setingkat dengan negara "V", ia juga akan mencetuskan pemberontakan di negara "Z" itu. Kita hanya dapat mengetahui, bahwa suatu kondisi tertentu telah mencetuskan pemberontakan, setelah pemberontakan itu terjadi, dan setelah dilakukan penelitian yang seksama. Dengan kata lain, melalui suatu analisis "*post facto retraction*", secara kasus demi kasus.

KEKERASAN POLITIK

Kekerasan Politik Dalam Sejarah

Sebahagian besar dari sejarah manusia adalah sejarah kekerasan politik. Memang ada beberapa suku bangsa primitif yang diketahui tidak mengenal agresi, seperti suatu suku di Sikkim, beberapa suku di Amerika dan di Amerika Selatan. Barangkali suku-suku itu berbahagia, tetapi yang pasti mereka berada di luar sejarah. Umat manusia selainnya tidak luput dari kekerasan politik. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah

keadaan yang damai, tenang, beradab dan berperikemanusiaan itu yang normal, ataukah keadaan yang penuh gejolak dengan kekerasan.

Juga tidak ada kesepakatan mengenai apa yang menimbulkan kekerasan politik itu. Terdapat berbagai teori mengenai asal, sifat dan fungsi dari kekerasan politik. Ada yang melihatnya sebagai gejala yang rasional, ada pula yang menganggapnya irrasional. Ada yang menginterpretasikan sebagai cara dan sarana untuk menghapus keterbelakangan, kedunguan atau tirani, tetapi sebaliknya ada pula yang memandang sebagai alat dan cara menyebarkan kebiadaban. Terdapat silang pendapat tentang sifatnya, permanen atau sementara, juga tentang penyebabnya, apakah faktor-faktor sosial-ekonomi atau sosial-psikologis.

Ambillah misalnya sebagai contoh, dasawarsa 1960 di Amerika Serikat, yang penuh kerusuhan dan kekerasan, dicetuskan oleh mahasiswa. Mulai dari gerakan radikal memprotes dan menentang sistem sosial dan politik yang ada, mencuatnya gerakan hak-hak sipil penduduk kulit hitam, protes kebudayaan dalam bentuk muncul dan berkembangnya "kontra-budaya", seperti penetrasi dan proliferasi

berbagai aliran mistik dari dunia Timur, yang menitik-beratkan ajarannya pada pembebasan individu dari kesibukan-kesibukan dan tekanan-tekanan kehidupan masyarakat modern; penggunaan obat bius yang dapat mengubah pikiran dan perasaan, sampai ke pemujaan rezim-rezim komunis monolitik, terutama rezim Mao di Cina atau Castro di Kuba, yang mempengaruhi pandangan dan ideologi politik mahasiswa, bersamaan dengan penolakan otoritas dan kekuasaan yang ada serta kecenderungan mereka untuk membenamkan diri ke dalam "akunya" sendiri (*"self-absorption"*).

Semuanya itu timbul mendadak, seolah-olah jatuh begitu saja dari langit tanpa sebab. Pada permulaan dasawarsa itu, para ahli ilmu sosial, baik yang konservatif, liberal, maupun yang radikal sependapat, bahwa para mahasiswa Amerika pada dasarnya adalah konservatif dan mendukung sistem sosial dan politik yang ada. Tak ada yang memperkirakan munculnya suatu gerakan mahasiswa yang sedemikian radikal. Banyak yang mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa khusus yang dialami, seperti perang Vietnam dan masalah rasial yang meruncing. Golongan Marxist atau neo-Marxist melihat krisis dalam sistem kapitalis-

me yang semakin parah itulah yang merupakan penyebabnya.

Tetapi teori-teori yang paling banyak beredar menyimpulkan, bahwa para aktivis mahasiswa itu adalah generasi produk perubahan pola-pola kebudayaan yang sedang berlangsung serta pendidikan yang terlalu lunak, terlalu memanjakan, terlalu demokratis dan terlalu *"permissive"*. Baru sesudah periode gejolak itu berlalu dan setelah mengkaji-ulang, kebanyakan para pakar berpendapat, bahwa kekuatan-kekuatan yang melahirkan gerakan-gerakan protes itu sudah muncul sebelum dan berada di luar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode itu. Perang Vietnam dan gerakan hak-hak sipil, di samping peristiwa-peristiwa lainnya, berfungsi sebagai katalisator atau akselerator belaka.

Semula diperkirakan, bahwa radikalisme itu akan berlanjut menjadi revolusi sosial dan merombak sistem nilai Amerika Serikat. Tetapi pada dasawarsa berikutnya, ia malahan lenyap, juga tanpa sebab atau alasan yang jelas. Namun bagaimanapun juga, periode itu telah sangat mempengaruhi kehidupan di Amerika Serikat. ⁵⁾

Macam-macam Kekerasan Polifik

Adalah sulit dan juga tidak terlalu bermanfaat untuk merinci semua macam kekerasan politik, karena terlalu banyak dan akan selalu ada yang terlupakan. Oleh karena itu cukup dilihat penggolongan besarnya saja. Dilihat dari sudut sejarah, kekerasan politik itu dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu: (1) kekerasan politik tradisional; (2) kekerasan politik modern, atau revolusi.

Pemberontakan atau perjuangan kemerdekaan melawan penjajah adalah kekerasan politik yang paling utama dalam golongan *kekerasan politik tradisional*. Motivasi yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan itu demikian hebat kekuatannya, sehingga dalam sejarah tidak ditemukan suatu kekuatan penjajah yang mampu menghancurkan atau mengikis habis suatu gerakan kemerdekaan, jika hasrat untuk merdeka telah betul-betul merasuk jiwa dan sukma bangsa yang bersangkutan. Tindakan-tindakan represif yang kejam dan teror yang dilakukan penjajah untuk mematahkan perjuangan kemerdekaan, mungkin dapat menghentikannya untuk

sementara, tetapi tidak mungkin mengikis habis semangat kemerdekaan rakyat. Pada suatu waktu ia pasti akan meledak kembali mengobarkan perang kemerdekaan yang lebih hebat sampai tujuan akhirnya tercapai.

Dalam golongan pertama ini juga termasuk bentrokan-bentrokan bermotif SARA, seperti di Cyprus antara penduduk keturunan Yunani dan Turki, di Belgia antara penduduk yang berbahasa Flaams dan berbahasa Perancis, di Canada antara keturunan Perancis dan keturunan Inggris, di Yugoslavia, Syria, Irak, Turki, Sri Lanka, India, Ethiopia, Bangladesh, Uni Soviet, Fiji, dan Banyak negara lain. Mungkin unsur-unsur dari luar dapat menyusup dan menanggulangi bentrokan-bentrokan SARA ini, namun pada dasarnya ia adalah tetap kekerasan politik dalam negeri. Pertikaian SARA sangat berbahaya, kalau tidak dapat diselesaikan, bahkan dapat menghancurkan keutuhan bangsa dan memecah negara, seperti yang telah terjadi dengan Pakistan yang pecah menjadi dua negara. Ia juga masih tetap merupakan ancaman yang sangat mencemam di India, Sri Langka, Irlandia Utara, Lebanon, Yugoslavia, bahkan juga di Uni Soviet sekarang.

pada keadaan yang lebih baik dan bahkan terus meningkat, ia akan merasa seperti orang yang dirampas haknya secara sewenang-wenang. Ia merasakan suatu jurang yang membesar antara aspirasi dan kemampuannya yang memaksanya menderita kekurangan, sedangkan orang lain berkecukupan bahkan sering berlebihan. Keadaan ini disebut "deprivasi relatif". Jika ia tidak menemukan jalan untuk mengurangi tekanan deprivasi relatif itu, ia akan cenderung mengambil jalan keras melampiaskan kekecewaannya.

Keadaan demikian itu umumnya merupakan ciri suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi sosial-ekonomi. Perubahan-perubahan aspirasi/harapan dan kemampuan terjadi pada sekian banyak kelompok masyarakat, pada setiap substruktur dari sistem masyarakat, meliputi kesejahteraan material dan penghasilan, status sosial, mobilitas sosial, dan pengaruh atau kekuasaan politik. Pendidikan yang semakin baik serta peranan media massa yang semakin besar, semakin membuka mata rakyat terhadap kejadian dan keadaan di sekelilingnya, di dalam maupun di luar negeri. Rakyat melihat dan berkenalan dengan hal-hal yang serba

baru dan asing baginya: nilai-nilai, gagasan-gagasan, wawasan, gaya hidup, dll. Semuanya itu semakin meningkatkan harapan, aspirasi dan kebutuhannya. Ketidakmampuannya memenuhi peningkatan "demands" itu, sedangkan ia melihat lingkungan sekelilingnya mampu, memperdalam rasa kecewanya, rasa didiskriminasikan, rasa ketidakadilan.

Frustrasi dan ketimpangan-ketimpangan masyarakat itu timbul dalam keadaan :

- a. aspirasi *meningkat*, kemampuan *tetap*;
- b. aspirasi *meningkat lebih cepat* daripada kemampuan;
- c. aspirasi *tetap*, kemampuan *berkurang*;
- d. aspirasi *meningkat*, kemampuan *mula-mula juga meningkat tetapi kemudian menurun*.

Dari data hasil pengamatan terhadap masyarakat yang sedang dalam proses modernisasi sosial-ekonomi, dapat disimpulkan, bahwa kekerasan sipil/politik lebih besar kemungkinannya dalam keadaan aspirasi dan kemampuan berubah dengan perbedaan yang membesar antara kedua unsur itu.

Huntington menulis, bahwa hubungan antara *modernisasi dan kekerasan adalah* sangat kompleks.⁹⁾ Hasil-hasil penelitian mengenai suatu masyarakat, tidak secara *ipso facto* juga berlaku untuk masyarakat lain. Sebagai umpama, banyak kejadian-kejadian yang mendorong pengambilan kesimpulan umum, bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan ketidakstabilan politik. Ia mengambil interpretasi de Tocqueville tentang Revolusi Perancis sebagai contoh. De Tocqueville menulis, bahwa revolusi (Perancis) "didahului oleh keadaan kesejahteraan yang tidak pernah ada sebelumnya". Tetapi "kesejahteraan yang terus meningkat ini, tidak membuat rakyat tentram, malahan menimbulkan suasana gelisah di mana-mana" dan "justru di daerah-daerah di mana terjadi perbaikan-perbaikan yang terbanyak, terdapat ketidakpuasan yang terbesar". Kondisi perbaikan ekonomi serupa juga mendahului revolusi-revolusi Amerika dan Rusia, dan ledakan-ledakan agitasi serta ketidakpuasan di Inggris pada penghujung abad-18. Revolusi Meksiko juga terjadi setelah pertumbuhan ekonomi yang spektakuler selama 20 tahun. Cukup banyak data-data dari lain-lain negara yang memperkuat kenya-

taan itu. Kita dapat menambah rangkaian "bukti" ini dengan contoh-contoh yang paling mutakhir, seperti Korea Selatan dan RRC.

Namun kesimpulan itu tidaklah universal. Selama dasawarsa 1950 terdapat korelasi yang kecil antara pertumbuhan ekonomi cepat dan kekerasan politik di 53 negara. Jerman Barat, Jepang, Rumania, Yugoslavia, Australia, Uni Soviet, Itali dan Cekoslovakia mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, tetapi sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, terjadi kekerasan politik. Tetapi di Bolivia, Argentina, Honduras, dan Indonesia terjadi banyak kekerasan politik, padahal pertumbuhan ekonomi sangat rendah, bahkan dalam beberapa kasus malahan negatif.

Dengan mengingat hal itu semua, kita sekarang dapat menyatakan kaitan antara kekerasan sipil/politik dan kemajuan sosial-ekonomi atau modernisasi, sebagai berikut :¹⁰⁾

1. Kekerasan sipil/politik lebih merupakan ciri dari masyarakat yang sedang dalam proses modernisasi (masyarakat transisi), ketimbang masyarakat yang sudah mencapai tingkat modernitas yang tinggi atau masih sangat tradisional.

Golongan kedua: *kekerasan politik modern* atau *revolusi* adalah kekerasan-kekerasan yang pada dasarnya bertujuan mengubah sistem sosio-politik secara menyeluruh, yang “*anti-establishment*” dan *anti system* yang berlaku, seperti Marxisme-Leninisme-Maoisme yang hendak mencetuskan revolusi dunia, nihilisme, anarkhisme, atau idealisme yang ingin membersihkan masyarakat dari segala kebobrokan.

Pengertian sederhana dari *revolusi* ialah *ledakan perubahan sosial yang dahsyat dan mendasar*. Ia adalah suatu cara atau bentuk perubahan sosial yang merupakan reaksi terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam suatu sistem sosial. Kondisi-kondisi itu merupakan indikasi ketidakmampuan sistem sosial yang bersangkutan mengatasi/menyesuaikan diri dengan kesulitan/gangguan (disfungsi) yang terjadi pada satu atau lebih substruktur dari sistem itu.

Disfungsi terjadi karena tekanan-tekanan dari dalam dan luar sistem itu sendiri, yang membahayakan keseimbangan sistem itu. Tekanan-tekanan itu ditimbulkan misalnya oleh penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan dan teknologi, penetrasi dan

meluasnya pengaruh budaya asing, modernisasi, imperialisme/neo-imperialisme, kolonialisme/neo-kolonialisme, munculnya aliran-aliran agama dan kepercayaan baru, perang dan sebagainya.

Tidak setiap reaksi mengatasi disfungsi berlangsung secara revolusioner. Ia juga dapat berlangsung secara tertib tanpa penggunaan kekuatan, yaitu secara *evolusioner*. Revolusi terjadi karena perubahan sistem sosial secara evolusioner itu tidak mungkin karena *dihalangi penguasa*, baik secara sadar atau karena tidak mengerti dinamika masyarakat. Semakin banyak sub-struktur dari sistem sosial mengalami disfungsi, tanpa menimbulkan perubahan evolusioner dalam mengatasinya, semakin besar pula kemungkinan meledaknya revolusi. Apabila semua sub-struktur mengalami disfungsi sehingga menimbulkan *gangguan sistemik* tanpa terjadi penyesuaian evolusioner, maka keadaan sudah “matang” untuk ledakan revolusi yang dahsyat, suatu “*revolusi akbar*”. Revolusi akbar adalah ledakan sosial secara beruntun dalam suatu ruang dan waktu yang bersamaan, dimulai dari sub-struktur sosial yang mengalami tekanan terberat. Revolusi dalam pengertian ini a.1.

adalah revolusi-revolusi Perancis, Rusia, Cina, Vietnam, dan Cuba.⁶⁾

Dalam setiap macam kekerasan politik, baik dari golongan pertama (tradisional), maupun golongan kedua (modern atau revolusi), terorisme dapat terjadi. Dalam golongan pertama, pemberontakan/ perjuangan kemerdekaan memberikan peluang paling besar bagi munculnya terorisme, sedangkan dalam golongan kedua, terorisme merupakan cara yang normal, terutama dalam revolusi-revolusi "keras", seperti komunisme.⁷⁾

Beberapa faktor dan kondisi yang memungkinkan timbulnya kekerasan politik.⁸⁾

Seperti telah ditulis terdahulu, tidak dapat digeneralisasikan penyebab kekerasan politik. Terlalu banyak variabel yang terdapat dalam sekian banyak macam dan ragam masyarakat. Oleh karena itu di bawah ini dicantumkan hanya beberapa faktor dan kondisi yang *memungkinkan* timbulnya kekerasan, bukan yang *menyebabkan* kekerasan.

Tekanan-tekanan dari dalam dan dari luar terhadap salah satu atau lebih

sub-struktur dari sistem sosial, yang membuat sub-struktur itu tidak berfungsi, merupakan hal normal dalam masyarakat yang dinamis. Juga adalah wajar jika anggota dari sistem sosial itu, paling tidak golongan elitnya, sadar akan hal itu dan biasanya mampu mengidentifikasi permasalahannya dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam suatu negara demokrasi hal-hal itu berlangsung melalui proses demokrasi. Dengan demikian perubahan sosial akan terjadi secara normal evolusioner. Tetapi, jika proses demikian itu tidak berjalan, sehingga penyesuaian dan perubahan sosial tidak terjadi, disfungsi akan menjalar dan meluas ke substruktur-substruktur lain. Dengan demikian terciptalah kondisi bagi munculnya kekerasan politik.

Manusia cenderung bertindak keras, jika ia mengalami kekecewaan besar. Pada umumnya manusia frustrasi, jika harapan/aspirasi/kebutuhannya, baik rohaniah, fisik, maupun material, tidak dapat dipenuhinya. Frustrasi melahirkan perasaan marah seolah-olah ketidakmampuannya itu karena tidak diberi kesempatan. Jika ia melihat, bahwa orang-orang lain seprofesi, setingkat atau selingkungan, berada

Data penelitian menunjukkan, bahwa dalam masyarakat modern kekerasan sipil jauh lebih sedikit daripada dalam masyarakat transisi. Dalam masyarakat tradisional terjadi lebih banyak kekerasan dibanding masyarakat modern, tetapi lebih sedikit daripada dalam masyarakat transisi.

2. Kekerasan sipil/politik lebih merupakan ciri dari masyarakat dengan modernisasi sosial-ekonomi yang cepat, ketimbang masyarakat yang proses itu berjalan lebih lambat. Tidak terlalu banyak data empiris mengenai hal ini, namun dari data yang ada, kesimpulan tersebut dapat dianggap absah.
3. Kekerasan sipil/politik lebih merupakan ciri dari masyarakat dengan proses-proses modernisasi yang timpang ("*unbalanced*") di mana tingkat mobilitas sosial lebih tinggi dari pada tingkat kemajuan ekonomi. Ini berarti adanya jurang atau ketimpangan yang membesar antara aspirasi (diindikasikan oleh mobilitas sosial) dan kemampuan/kesempatan (diindikasikan oleh kemajuan ekonomi).
4. Kekerasan sipil/politik lebih me-

rupakan ciri dari masyarakat dengan kemampuan/kesempatan yang diciptakan oleh modernisasi tidak merata di antara kelompok-kelompok sosial, ketimbang masyarakat dengan kemampuan/kesempatan yang lebih merata.

Aspirasi suatu kelompok selalu akan meningkat, jika melihat atau mengetahui, meningkatnya kesempatan/kemampuan dari kelompok serupa lainnya atau tetangganya.

Modernisasi di bidang ekonomi diindikasikan oleh meningkatnya industrialisasi, urbanisasi, pendapatan per kapita, perluasan lapangan kerja di luar sektor agraria dan diversifikasi profesi. Di bidang politik, modernisasi meningkatkan dan meluaskan peran pemerintah, berkembangnya hubungan yang semakin terbuka antara pemerintah dan rakyat, meningkatnya kesadaran politik rakyat dan keterlibatan perorangan dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya dalam politik nasional. Secara singkat: meningkat atau meluasnya *keterbukaan dan partisipasi* rakyat dalam proses politik.

Orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat yang frustrasi di bidang ekonomi, akan mencoba memperkecil kekecewaan dan ketimpang-

an ekonomi itu melalui jalur politik. Tetapi jika saluran itu tidak ada atau tertutup untuk mereka, atau jika perasaan deprivasi relatif itu demikian dalamnya, kekerasan politik merupakan satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh.

Kekerasan Politik dan Sistem Internasional

Seperti diketahui, politik luar negeri bertujuan melindungi dan menyukkseskan kepentingan-kepentingan nasional di arena internasional. Adakalanya kepentingan nasional dari beberapa negara berjalan paralel, tetapi kadang-kadang bertentangan atau terjadi silang-kepentingan. Negara yang lebih "Agresif". terlebih dahulu akan menggunakan segala cara, kecuali perang terbuka, untuk memenangkan kepentingan nasionalnya, termasuk memanfaatkan kondisi kekerasan sipil di negara saingannya.

Dalam era perang dingin, kedua adikuasa yang saling berkonfrontasi mencoba memperluas pengaruhnya di negara-negara Dunia ketiga dengan tujuan: (1) *mencegah* masuk dan meluasnya pengaruh lawan, dan (2) *membangun/mengembangkan* penga-

ruh sendiri. Dalam rangka kedua tujuan itu setiap peluang yang ada atau dapat diadakan, akan dimanfaatkan. Di sinilah terletak perkaitan kekerasan politik dengan sistem internasional.

Intensitas dari keterlibatan negara luar dengan kekerasan politik dalam suatu negara lain, ditentukan oleh nilai strategis negara itu, baik karena lokasi geografisnya atau karena sumber daya alamnya, atau kedua-duanya. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini ialah "mencegah" akses lawan atau "memperoleh" akses sendiri ke hal yang dinilai strategis itu.

Selain dari pada "kaitan langsung" antara kekerasan politik dan sistem internasional, juga ada hubungan "tidak langsung", yaitu pengaruh sosial-psikologis. Dalam dunia yang semakin kecil ini, apa yang terjadi di suatu negara akan mempunyai pengaruh terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara sekitar. Kekerasan sipil dapat "menular" ke negara-negara tetangga secara "alamiah", tetapi dapat pula "ditularkan oleh pimpinan kelompok-kelompok yang terlibat. Dengan demikian, konflik-konflik itu akan berkembang menjadi konflik "trans-nasional".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dua tipe hubungan antara berbagai bentuk kekerasan sipil/politik dan sistem internasional, yaitu:

1. *hubungan aktif rasional*, dalam mana negara-negara dan lembaga-lembaga internasional mempengaruhi kekerasan sipil.
2. *hubungan sosial-psikologis* yang merupakan saluran dari guncangan-guncangan yang ditimbulkan oleh kekerasan politik.

Dalam tipe pertama termasuk seluruh spektrum dari intervensi, baik resmi maupun tidak resmi, melalui diplomasi, penggunaan kekuatan fisik, bantuan uang (dana-dana), propaganda, latihan, dan lain-lain. Semua bentuk intervensi itu dapat bertujuan untuk membantu pemerintah, membantu pembangkang, atau melakukan mediasi antara keduanya. Interaksi antara kekuatan-kekuatan internasional dalam hubungan intervensi, dapat menjurus keempat tipe pola:

1. Kekerasan sipil internasional atau transnasional, dalam arti bahwa para pembangkang berbagai negara saling membantu.
2. Aliansi antar-pemerintah, dalam arti bahwa pemerintah-pemerintah

dalam suatu kawasan saling membantu.

3. Kesepakatan kolektif untuk mediasi.
4. Abstensi, dalam arti tidak ingin terlibat sama sekali.

Dalam tipe kedua termasuk berbagai macam hubungan antarkelompok perusuh melewati batas nasionalnya masing-masing, berdasarkan kaitan-kaitan ideologi, ekonomi, ras, etnik, agama atau bentuk-bentuk solidaritas lainnya. Kaitan-kaitan ini memperluas kekerasan politik melalui interpenetrasi, penularan, imitasi, emulasi, dan sebagainya. ¹¹⁾

TERORISME

Pengertian dan Asal Usul Terorisme

Seperti telah disinggung terdahulu, *terorisme* adalah salah satu bentuk kekerasan politik, dengan beberapa ciri khas, sebagai berikut:

1. pengeksploitasian rasa takut manusia secara sistematis;
2. penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik;
3. penggunaan unsur pendadakan dan kejutan;

4. perencanaan yang cermat;
5. mempunyai sasaran strategis dan spesifik, yang pada umumnya adalah non-kombatan, dalam mencapai tujuan politik.

Salah satu pengertian politik ialah "penyelesaian konflik", yaitu upaya untuk mencapai suatu persetujuan antar-individu atau antar kelompok mengenai suatu kepentingan bersama. Ia merupakan permulaan dari proses peradaban. Proses pembiada-ban mulai, bila konsiliasi gagal dicapai dan terorisme dilancarkan. Terorisme menentang proses sivilisasi. Ia digunakan bila sarana-sarana politik biasa sudah tidak berfungsi lagi, dengan kata lain, "terorisme adalah lanjutan politik dengan cara-cara lain".

Dengan demikian, diktum Clausewitz mengenai perang, juga dapat diberlakukan untuk terorisme. Jadi terorisme adalah juga perang, yaitu *perang politik* ("political warfare"). Tetapi berbeda dari perang sebagai tindakan kekerasan yang legal dan menggunakan alat negara resmi (Angkatan Perang), teror dan terorisme adalah illegal, bahkan kriminal.

Terorisme individual maupun kolektif bukan hal baru. Pembunuhan poli-

tik adalah kejadian yang biasa dalam sejarah kuno Cina, dalam zaman Yunani dan Romawi. Tetapi dalam pengertian politik dan penggunaan modern, terorisme mencuat dalam Revolusi Perancis. Ia bahkan menjadi politik resmi dari pemerintahan revolusioner yang terkenal sebagai "*The Reign of Terror*".

"Pemerintahan teror" itu dimungkinkan dengan tiga ciri utama dari Revolusi Perancis:

1. Runtuhnya klas-klas sosial bersamaan dengan naiknya massa rakyat sebagai kekuatan politik.
2. Lahirnya konsep *kehendak rakyat* ("*volonte generale*") yang menjadi landasan "konstitusional" dari terorisme.
3. Sentralisasi ketat pemerintahan atau "etatisme".

Robespierre, seorang figur dominan dalam Revolusi Perancis dan pemimpin "kelompok Jacobins" yang sangat berkuasa selama "Reign of Terror", berkata: "Atribut suatu pemerintahan rakyat dalam revolusi adalah *kebijaksanaan dan teror*. Kebijaksanaan tanpa teror adalah fatal, teror tanpa kebijaksanaan adalah impoten. Teror tidak lain adalah keadilan seketika, keras, tegar; jadi, ia adalah pancaran dari

kebajikan".¹²⁾ Robespierre juga berkata: "Motto pertama dari kebijakan kita ialah bahwa kita harus memimpin rakyat dengan *Otak* dan musuh-musuh rakyat dengan *Teror*."¹³⁾

Yang dimaksud dengan musuh-musuh rakyat atau musuh-musuh revolusi, ialah bangsawan, rohaniwan dan penimbun kekayaan ("hoarders). Namun, dalam perkembangannya, teror menggantikan otak, dan tujuan Revolusi berubah menjadi *mencari dan mengejar musuh-musuh*. Robespierre sendiri akhirnya juga menjadi korban dari gerakan teror yang dibangkitkannya. Kaum Jacobins berpendapat, bahwa "*Reign of Virtue*" (pemerintahan kebajikan, Ratu Adil?) tidak mungkin datang sebelum "*Reign of Terror*" menyelesaikan tugasnya.

Cara berfikir kaum Jacobins (Robespierre) demikian, juga ditemukan dalam karya tulis Karl Marx yang menjadi dasar pembenaran ("rationale") dari terorisme komunis. Marx dan Frederick Engels melihat sejarah dan masyarakat hanya dalam hubungan konflik dan perjuangan untuk merebut kekuasaan materiil. Perubahan sejarah terjadi karena suatu kelas ekonomi merebut dan menggulingkan dominasi kelas lain dengan kekerasan. Marx menulis dalam *Neue Rheinische*

Zeitung tanggal 7 Nopember 1848: "... hanya ada satu cara yang dapat memperpendek rintihan sakratulmaut orde lama, yaitu *teror revolusioner*."¹⁴⁾

Terorisme dapat digunakan sebagai senjata defensif maupun ofensif, untuk memelihara status quo, atau untuk merusak sistem yang ada. Motivasi dasar didirikannya "Ku Klux Klan" di bahagian Selatan Amerika waktu perang saudara, "Organisation de l'Armee (OAS)" di Aljazair waktu Perancis mencoba menindas keinginan merdeka rakyat Aljazair, bertujuan defensif, yaitu memelihara "status quo". Sedangkan "EOKA" di Cyprus, "Irgun" dan "Stern" di Palestina, "IRA" di Irlandia Utara, "the Weathermen" di Amerika Serikat, "Tupamaros" di Uruguay, kelompok "Bader-Meinhof", "Red Brigade", dan lain-lain, mempunyai tujuan ofensif.

Salah satu bentuk kekerasan politik yang banyak mengandalkan terorisme, adalah *perang gerilya*, sehingga ia sering diidentikkan dengan terorisme. Padahal kedua bentuk kekerasan itu berbeda. *Perang gerilya* adalah perang antar negara, yang dilakukan oleh pihak yang lemah, yaitu pihak/negara yang diserang, melawan pihak yang kuat, yaitu pihak/negara yang

menyerang. Istilah ini pertama kali digunakan oleh pejuang Spanyol pada tahun 1810 melawan tentara Napoleon. Perang gerilya biasanya dilakukan dalam kerangka strategi yang lebih besar untuk membantu tentara reguler. Tetapi ia juga dapat berdiri sendiri, terutama apabila tentara reguler sudah hancur, untuk meneruskan perlawanan terhadap agresor. Berbeda dari terorisme yang sasarannya adalah non-kombatan, sasaran utama perang gerilya adalah unsur-unsur kombatan, c.q. kekuatan militer reguler lawan. Tetapi adakalanya, bahkan sering, gerilya juga menghantam sasaran-sasaran non-kombatan, terutama untuk mengacau lam bung atau daerah belakang pasukan lawan, sehingga musuh terpaksa memecah kekuatan dan perhatiannya.

Perang gerilya menggunakan taktik dan cara-cara konvensional dan non-konvensional, termasuk penggunaan teror. Dengan demikian teror, atau terorisme adalah *salah satu cara* yang digunakan oleh gerilya, meskipun sering dalam skala yang luas. Hal ini terjadi jika perang berlangsung lama, dan pihak musuh semakin ganas karena tidak berhasil mematahkan perlawanan gerilya. Namun, sasaran utama gerilya tetap tentara/kombatan

lawan. Perang gerilya dan gerilyawan diakui dalam Konvensi Jenewa mengenai "ketentuan-ketentuan perang" (*Articles of War*), asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, perang gerilya tidak termasuk dalam kategori kekerasan sipil/politik.

Dalam kekerasan sipil/politik, adakalanya kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan itu menjalankan cara-cara perang gerilya. Hal ini biasanya terjadi dalam revolusi yang berlanjut menjadi perang saudara. Kedua pihak melakukan taktik gerilya dan lawan gerilya. Tetapi melakukan taktik perang gerilya, tidak mengubah hakekat kekerasan sipil/politik menjadi perang gerilya.

Terorisme tidak hanya dilakukan melawan kekuasaan resmi, c.q. Pemerintah, tetapi juga dapat dijalankan oleh Pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Ini adalah *terorisme resmi atau terorisme negara* ("state terrorism"), yang dijalankan oleh pemerintahan fasis, diktatur atau totaliter. Beberapa contoh selain "The Reign of Terror" dalam Revolusi Perancis, ialah Pemerintah Uni Soviet (rezim Stalin), Nazi Jerman, RRC, Cambodia (Pol Pot), Haiti (Papa Doc), Rumania (Ceausescu), dan lain-lain.

Beberapa Sasaran Strategis Terorisme Dalam Rangka Mencapai Tujuan Politik

Beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai dengan terorisme, ialah sebagai berikut:

1. Memaksakan *konsesi-konsesi* tertentu kepada lawan/penguasa, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan (politik), penyebarluasan pesan/pengumuman/pernyataan, dan sebagainya.
2. Memperoleh *publisitas* luas, untuk menarik perhatian umum termasuk perhatian internasional, terhadap tujuan perjuangan dan agar diri sendiri diakui sebagai pihak yang bersengketa dan perlu diperhatikan. Karena biasanya kelompok teroris itu kecil, maka untuk mencapai sasaran itu tindakan yang dilakukan harus dramatis dan spektakuler.
3. Menimbulkan *kekacauan tuas, demoralisasi dan keruntuhan tatanan sosial*. Sasaran strategis ini sering tidak tercapai, bahkan bisa menjadi bumerang, karena masyarakat langsung terkena. Mereka yang tadinya mungkin bersimpati dengan tujuan yang diperjuangkan kelompok teroris, dapat berbalik membantu penguasa memberantas terorisme yang membabi-buta.
4. Memancing penguasa melakukan tindak balas berlebihan (“*overreaction*”) atau *kontra teror*, sehingga dapat memunculkan situasi yang menguntungkan teroris.
5. Memaksakan *kepatuhan rakyat*. Ini adalah sasaran khas terorisme oleh penguasa/pemerintah totaliter/fasis/diktatur. Dalam lingkungan para teroris sendiri, sasaran itu dimaksud untuk “menghukum” anggota-anggota yang dianggap tidak loyal.
6. *Menghukum* orang-orang yang dianggap bersalah, atau yang merupakan simbol dari kesalahan, seperti orang-orang yang tidak setuju dengan tujuan politik para teroris, yang bekerjasama dengan lawan, pejabat pemerintah, mereka yang gaya hidupnya dianggap tidak sesuai, dan sebagainya.

Tindakan untuk mencapai salah satu atau kombinasi dari sasaran strategis tersebut dapat mengambil bentuk penyanderaan, penculikan, pembunuhan

an, pembajakan, pengeboman, peledakan, peracunan massal, ancaman melalui surat-surat selebaran dan lain-lain media, demonstrasi kekuatan, dan sebagainya.

Terorisme Internasional

“Perang politik”, terbuka atau tertutup, sudah lama ada, sering dikenal dengan istilah *perang urat syaraf*. Sejak akhir Perang Dunia II, berbagai pergolakan dalam berbagai bentuk, membuat dunia tidak pernah mengenal “damai”. Baik perang antar-negara maupun kekerasan-kekerasan politik, berlangsung terus menerus, terutama di Dunia Ketiga. Keadaan ini membuka peluang bagi munculnya terorisme internasional, yang sangat meningkat dalam tahun 1970-an. Tetapi berbeda dari perang antar-negara dan kekerasan politik yang untuk sebahagian besar berlangsung di Dunia Ketiga, terorisme internasional terjadi di mana-mana. Menurut *Journal of Defense & Diplomacy* terbitan bulan Nopember 1984, peristiwa teroris internasional yang tercatat selama kurun waktu 1973 - 1982, berjumlah 6,473, dengan distribusi geografisnya sebagai berikut : Eropa Barat 2,379; Timur Tengah

1,395; Amerika Latin 1,271; Amerika Utara 606; Asia 330; Afrika 232; Uni Soviet dan Eropa Timur 82; selebihnya di Australia dan beberapa negara lainnya. ¹⁵⁾

Golongan diplomat ternyata merupakan sasaran utama, khususnya diplomat Amerika Serikat. Antara 1968 dan Mei 1983 terorisme dengan diplomat sebagai sasaran tercatat di 130 negara, terbanyak adalah diplomat Amerika Serikat. Lebih dari 70 persen dari peristiwa tersebut terjadi di negara-negara sebagai berikut :¹⁶⁾

Amerika Serikat (377); Jerman Barat (183); Lebanon (182); Perancis (157); Turki (119); Yunani (110); Kolombia (108); Argentina (105); Italia (103); Nederland (99); Iran (98); El Salvador (89); Spanyol (70); Brazil (69); Guatemala (69); Inggris (69); Meksiko (60); Bolivia (56).

Terorisme internasional bukan masalah hukum saja, tetapi ia juga, bahkan lebih-lebih lagi merupakan masalah politik. Oleh karena itu akan selalu ada pihak-pihak yang membantu, baik karena rasa solidaritas, khususnya dalam rangka perjuangan menuntut kemerdekaan, maupun karena mungkin sesuai dengan atau meng-

untungkan kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Banyak pendapat, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga, yang dapat membenarkan terorisme dalam perjuangan kemerdekaan.

Terorisme internasional dapat berkembang karena bantuan dari pihak ketiga, baik resmi maupun tidak resmi. Bantuan itu dapat berbentuk, a.1. (1) pemberian latihan, baik di negara yang membantu, di tempat teroris, atau di negara ketiga; (2) pemberian alat-peralatan letal dan non-letal, diberi secara langsung atau melalui perantara; (3) bantuan propaganda, terutama mengenal kebenaran tujuan perjuangan kaum teroris; (4) melakukan disinformasi untuk merugikan lawan; (5) pemberian perlindungan ("*sanctuary*") bagi teroris; dan sebagainya.

Teknologi dan Terorisme

Ketidakstabilan dunia dan kemajuan teknologi memungkinkan berkembangnya terorisme, baik terorisme dalam negeri maupun internasional. Masyarakat modern rawan terhadap terorisme. Daerah perkotaan dengan lingkungannya yang padat, sangat ideal bagi terorisme kota ("*urban*

guerilla"). Kehidupan kota dengan kesibukannya yang tinggi, mudah dikacau dengan menyabot sistem jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan lalu-lintas, dan lain-lain. Kepanikan dan korban massal dapat ditimbulkan dengan meracuni sumber/persediaan air bersih. Udara dalam gedung-gedung bertingkat yang tertutup rapat, dapat diracun dengan bahan kimia dan biologis melalui sistem ventilasinya. Bahwa hal-hal ini tidak atau belum terjadi merupakan petunjuk, bahwa paling tidak sampai saat ini, pembunuhan massal tidak merupakan sasaran terorisme. Yang diburuhkannya ialah perhatian dan simpati massa.

Teknologi menyediakan alat-peralatan yang semakin efektif bagi terorisme. Kapal terbang sipil dapat dihancurkan dengan rudal tangan pada saat akan mendarat atau sewaktu sedang lepas landas. Proliferasi teknologi nuklir, memungkinkan timbulnya "terorisme nuklir". Meluasnya penggunaan reaktor nuklir yang menghasilkan plutonium dalam jumlah cukup besar, memperbesar kemungkinan "pencurian nuklir". Bahan peledak nuklir dan senjata-senjata nuklir "perseorangan" sudah tidak terlalu sulit lagi untuk dirancang dan dibuat.¹⁷⁾

Kelompok teroris yang berhasil mencuri nuklir dan membuat senjata atau bahan peledak nuklir, mempunyai kemampuan yang mengerikan, yang memungkinkannya melakukan *pemeriksaan nuklir* ("nuclear blackmail").

Teknologi informatika dan transportasi mempermudah upaya memperoleh perhatian massa dan dunia, dan mempertinggi mobilitas internasional. Berbagai kelompok teroris dari berbagai penjuru dunia, akan dapat lebih mudah menjalin kerjasama, seperti telah terbukti antara "United Red Army of Japan" dengan PLO dalam aksi teror di lapangan terbang Lod pada tahun 1972. Kerjasama terorisme internasional ini akan memungkinkan kelompok-kelompok kecil dengan sumber daya dan dana yang kecil pula, beroperasi lebih efektif dibandingkan dengan jika beroperasi sendiri-sendiri.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuhnya Terorisme

Terorisme "*an sich*", apalagi terorisme membabi buta, tidak pernah berhasil mencapai tujuan politiknya. Dukungan rakyat banyak yang mutlak diperlukan, tidak mungkin didapatnya.

Suatu negara demokrasi, betapapun tidak sempurnanya penyelenggaraannya, khususnya di negara-negara berkembang, tidak merupakan lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya terorisme. Selama tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh proses modernisasi dan kemajuan-kemajuan sosial-ekonomi mampu diidentifikasi oleh para penguasa dan mendapat penyaluran yang wajar, perubahan sosial akan berlangsung secara wajar pula.

Bahaya muncul apabila disfungsi salah satu atau lebih substruktur sistem sosial tidak mampu diidentifikasi, atau para penguasa membendung proses perubahan sosial untuk mengoreksi gangguan itu. Tindakan demikian akan mengakumulasikan dan memperluas tekanan-tekanan, sehingga menjalar ke sub-struktur lain-lainnya. Dalam keadaan demikian, biasanya hanya diperlukan suatu peristiwa atau sekelompok orang-orang ekstrim saja untuk menyulut dan meledakkan keadaan yang sudah gawat itu, baik dalam bentuk terorisme terencana dan sporadik atau bahkan dapat pula mencetuskan revolusi sosial. Satu kali revolusi meletus, ia sering tidak dapat dikendalikan lagi oleh orang-orang yang mencetuskannya. Dalam keadaan de-

mikian, tindakan-tindakan teror akan meluas dan merajalela.

Suatu "rumus" sederhana cukup baik untuk diingat-ingat oleh para elit, terutama elit politik, yaitu: "disfungsi jamak bersamaan dengan kepala batu para elit politik, ditambah faktor penyulut, akan dapat menimbulkan terorisme atau bahkan revolusi".¹⁸⁾ "Rumus" sederhana itu dapat dipakai untuk memantau dinamika masyarakat yang akan semakin tinggi, sebagai akibat proses modernisasi dan pembangunan sosial-ekonomi.

Seperti telah dijelaskan terdahulu, pembangunan sosial-ekonomi akan mempengaruhi aspirasi dan kemampuan, baik dari perorangan, kelompok, masyarakat, maupun seluruh bangsa. Laju pertumbuhan yang tinggi yang tidak seimbang, akan mengakibatkan perkembangan yang tidak seimbang antara aspirasi dan kemampuan. Keadaan ini mengandung bahaya munculnya berbagai bentuk kekerasan politik. Semakin besar ketimpangan antara aspirasi dan kemampuan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kekerasan politik, termasuk terjadinya terprisme.

Konsep "deprivasi relatif" tidak saja

berlaku dalam bidang sosial-ekonomi. Ia juga terdapat dalam bidang-bidang kehidupan lainnya dari masyarakat, seperti politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan faktor-faktor agama, suku, daerah. Konsep itu memberi pengertian tentang adanya korelasi antara aspirasi dan kemampuan, yang akan membantu dalam memantau dan mengidentifikasi masalah-masalah peka dan rawan, yang dapat menimbulkan kekerasan-kekerasan sipil/politik.

Kesimpulan

1. Terorisme adalah hanya salah satu bentuk, tetapi bentuk yang khas, dari kekerasan sipil/politik. Ia digunakan sangat luas dalam perang gerilya dan revolusi.
2. Hal-hal yang berlaku dalam kekerasan politik, *ipso facto* juga berlaku bagi terorisme.
3. Ketimpangan antara aspirasi dan kemampuan yang dirasa atau dipersepsi oleh sekelompok manusia dibandingkan dengan orang-orang lain yang selingkungan, yang biasa terjadi dalam suatu pembangunan/proses modernisasi yang tidak seimbang, memainkan peran penting dalam menciptakan kon-

disi yang memungkinkan terjadinya kekerasan-kekerasan politik, termasuk terorisme.

4. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi elit politik untuk memiliki pengertian yang baik tentang berbagai kemungkinan korelasi antara aspirasi dan kemampuan, serta kondisi masyarakat yang

dapat mencetuskan kekerasan politik. Juga pengertian "deprivasi relatif" sangat perlu dipunyai.

5. Akhirnya, keadilan, pemerataan dan keterbukaan, merupakan kondisi-kondisi "kunci" dalam mencegah terjadinya konflik-konflik kekerasan dan memelihara momentum pertumbuhan. □

Catatan Belakang

1. Hedley Bull, *Civil Violence and International Order*. Adelphi Papers No. 83, Part II: Violence and International Security. (The International Institute for Strategic Studies 1971), hal. 27.
2. Harry Eckstein (ed.), *Internal War* (New York: Free Press of Glencoe, 1964), hal. 3.
3. Lihat Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton: Princeton University Press, 1970), hal. 3; lihat juga Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, Fifth printing, 1971), hal. 3-4.
4. US Department of State Dispatch, May 6, 1991, hal. 339.
5. Untuk mengetahui lebih mendalam penilaian mengenai dasawarsa 1960 di Amerika Serikat, lihat *The Sixties: Dreams and Illusions*. The World & I, August 1988, hal. 548-640. Juga lihat Morris Dickstein, *The 1960s Today: A Summing Up*, The World & I, May 1989, hal. 600 - 609.
6. Untuk gambaran yang agak lebih luas, lihat Walter Laqueur, *Diversities of Violence and the Current World System*. Adelphi Papers No. 82. (The International Institute for Strategic Studies, December 1971), hlm.9 - 16.
7. Lihat selanjutnya Calmers Johnson, *Revolution and the Social System*. Hoover Institution Studies. (Stanford University, 1964).

8. Dalam menulis bahagian ini, penulis banyak meminjam dari artikel Samuel P. Huntington, *Civil Violence and the Process of Development*, Adelphi Papers No. 83 (The International Institute for Strategic Studies, December 1971), hal. 1 - 15.
9. Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (Yale University Press, Fifth Printing, 1971), hal. 39, dst.
10. Samuel P. Huntington, *Civil Violence and the Process of Development*. Adelphi Papers No. 83 (The International Institute for Strategic Studies, December 1971), hal. 1- 15.
11. Lihat Pierre Hassner, *Civil Violence and the Pattern of International Power*. Adelphi Papers No. 83 (The International Institute for Strategic Studies, December 1971), halo 16 -26.
12. Paul Johnson, *Modern Times* (New York: Harper and Row, 1985), hal. 66
13. Laurent Ladouce, *Was France the Fatherland of Genocide?* the world & I, January 1988, hal. 688.
14. Samuel T. Francis, *The Soviet Strategy of Terror*. The Heritage Foundation, 1985, mengkuot Karl Marx, *The Victory of the Counter-Revolution in Vienna*, dalam Karl Marx dan Frederick Engels, *Collected Works*, vol. VIII.
15. *Journal of Defense & Diplomacy*, Vol.2 No. 11, November 1984.
16. *Ibid.*
17. Mason Willrich and Theodore B. Taylor, *Nuclear Theft*. Survival, July/August 1974. (The International Institute for Strategic Studies).
18. Chalmers Johnson, *Op. Cit.*, hlm. 12.